



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
**UNIT KERJA** : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ESTI SURAHMI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **442016**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **385.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/60 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
2. Tanah Seluas 177 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.500.000
3. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **119.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 NF 125 SD/ SPM SOLO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX 135 1S7 JUPITER-MX/SPM. SOLO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 NF 125 TRF/SPD Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
4. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA 1,5 SV M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
6. MOTOR, HONDA G2E02R21LO M/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **8.000.000**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	318.509.497
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	831.009.497
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	831.009.497

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.